

# HUBUNGAN PARIWISATA DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Saryani

Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta

## **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pariwisata dan perubahan perilaku masyarakat khususnya perubahan perilaku dalam bidang pendidikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara dengan *informan*, dan data sekunder dengan membaca buku-buku yang relevan. Adapun di dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif.

Dalam kegiatan pariwisata pada dasarnya akan mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. Pertemuan antar manusia dengan latar belakang berbeda akan menghasilkan berbagai proses perubahan. Perubahan dalam nilai, sikap dan perilaku yang disebabkan adanya tuntutan kondisi lingkungan yang ada. Kegiatan pariwisata akan berhasil dengan baik disamping ditopang oleh daya tarik wisata yang memesona juga tersedianya sumber daya manusia yang mengelola daya tarik tersebut. Seiring dengan majunya pariwisata di Yogyakarta, maka kebutuhan sumber daya manusia pariwisata yang profesional, yang terdidik, terlatih dan terampil, tidak dapat dihindarkan. maka menjadi peluang dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas semakin besar. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pendidikan tinggi pariwisata, dan ini dibuktikan dengan minat calon mahasiswa yang menginginkan mempelajari bidang pariwisata.

## **PENDAHULUAN**

Panorama indah, peninggalan budaya masa lalu, telah mengangkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang menarik untuk dikunjungi dan memesona untuk disaksikan baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Para wisatawan dapat menikmati berbagai obyek dan daya tariknya serta variasi kegiatan wisata yang tersedia. Letaknya yang strategis dan tersedianya aksesibilitas serta sarana transportasi yang memadai menjadikan Yogyakarta menjadi semakin mudah dijangkau (Baparda DIY, 2009).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Adapun jumlah daya tarik wisata tersebut

meliputi, 48 jenis daya tarik wisata alam, 37 daya tarik wisata budaya, 24 daya tarik wisata buatan, 22 daya tarik yang sifatnya musiman (diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu), kawasan Malioboro, desa kerajinan Kasongan, desa kerajinan perak Kota Gede, serta kampung kerajinan batik Prawirotaman (Baparda DIY, 2009).

Kondisi ini memaksa Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang prima (terlatih, terdidik dan terampil). Sebagai gambaran kunjungan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya

**Tabel 1.** Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per kabupaten Tahun 2006-2010 dalam persentase

No	Kabupaten	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kota Yogyakarta	26,05	22,49	32,53	36,39	43,04
2	Kab. Sleman	36,56	40,87	35,99	38,15	29,80
3	Kab. Bantul	25,35	20,56	18,68	15,35	15,81
4	Kab. KulonProgo	6,12	10,15	7,17	4,48	5,41
5	Kab. GngKidul	5,92	5,93	5,63	5,63	5,94
	Jumlah	100	100	100	100	100

Meskipun kunjungan wisatawan naik, tetapi mengalami penurunan pada masa tinggal tamu, baik wisatawan manca negara maupun wisatawan nusantara. Pada tahun 2008 memiliki lama masa menginap bagi wisatawan mancanegara di hotel berbintang selama 1,91 hari dan tahun 2009 mengalami kenaikan 5,6% menjadi 2,02 hari, sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan 2,97% menjadi 1,96 hari. Adapun bagi wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang memiliki lama masa tinggal pada tahun 2008 1,70 hari dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,59% sehingga menjadi 1,69 hari dan tahun 2010 kembali mengalami penurunan sebesar 2,97% menjadi 1,63 hari. (Statistik Kepariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008, tahun 2009, tahun 2010).

Berangkat dari kondisi tersebut, pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberi dampak positif, yakni dapat menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang kebutuhan tenaga kerja. Lapangan kerja baru, seperti tenaga kerja hotel, motel, losmen, desa wisata atau tempat penginapan lainnya. Sementara peluang usaha, seperti katering, restoran, kedai kopi, maskapai penerbangan, biro perjalanan, angkutan darat dan usaha perjalanan lainnya. Selain itu, juga berdampak pada pengembangan sektor usaha dan jasa, seperti cinderamata, kerajinan tangan, perdagangan, hiburan, penerjemah dan

pramuwisata.

Keberhasilan kegiatan pariwisata tidak hanya sekedar ditopang oleh daya tarik wisata yang memesona, tetapi juga tersedianya sumberdaya manusia yang mengelola daya tarik tersebut dengan baik. Pariwisata tidak akan berhasil hanya dengan keberadaan obyek dan daya tarik wisatanya, tetapi harus didukung dengan sumberdaya manusia yang handal, berkualitas dan tanggap dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Artinya, saat menikmati obyek dan daya tariknya, wisatawan akan disuguhkan suatu atraksi yang sifatnya *intangibile*. Kondisi ini memaksa Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan pelayanan yang prima (terlatih, terdidik dan terampil).

Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang profesional dan berkualitas menjadi peluang yang cukup besar dalam sektor pariwisata. Pertumbuhan sektor pariwisata akan berdampak terhadap kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan pariwisata guna menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. Kegiatan pelatihan dan pendidikan pariwisata tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan pariwisata. Lembaga ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bukan saja mampu bersaing dalam lingkungan nasional tetapi juga mampu menembus persaingan global (Junaedhi Abas, 2002).

Profesionalitas dan kreatifitas merupakan kunci bagi berkembangnya industri pariwisata nasional maupun daerah dalam membangun citra, kualitas produk dan pelayanan yang kompetitif serta memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Kondisi tersebut harus dikuasai oleh para pengelola kegiatan kepariwisataandi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisatawan yang berkunjung memerlukan manajerial yang canggih dan inovatif. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang professional dan berkualitas.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pitana (2010), menyatakan bahwa kunci sukses dalam persaingan global di bidang pariwisata terletak pada sumber daya manusia pariwisata. Bidang pariwisata harus memiliki kelompok-kelompok akademi/peneliti yang memiliki kompetensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pariwisata (*tourism as a science*). Teknokrat yang memiliki kepentingan dalam pengembangan rancang bangun pariwisata, kebijakan, hukum, administrasi, pembangunan pariwisata, para profesional yang memiliki keahlian dalam aspek manajerial usaha pariwisata, serta tenaga teknis yang memiliki ketrampilan tugas-tugas teknis dalam usaha pariwisata ( pramuwisata, *staf food & beverage, front officed*an sebagainya).

Sudah saatnya memunculkan pemikir-pemikir yang ahli di bidang pariwisata yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah pariwisata, sehingga kontribusi mereka dapat segera dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan pariwisata. Industri pariwisata membutuhkan tingkat keahlian yang memadai. Artinya, tenaga kerja yang terdidik, terlatih dan terampil. Hal tersebut dapat dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan pariwisata baik formal dan non formal. Mulai dari jenjang pendidikan di sekolah menengah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

## LANDASAN TEORI

### Pariwisata

Banyak pakar meramalkan pariwisata akan menjadi paradigma baru dalam mendukung perekonomian global di abad XXI ini. Kegiatan ini telah menjadi fokus perhatian dunia, karena mengalami tingkat pertumbuhan paling besar dalam dekade ini. Oleh karenanya pariwisata menjadi kebijaksanaan strategis dan merupakan alternatif nasional yang banyak dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pariwisata sebagai industri yang diprediksi memiliki peran penting dan semakin besar, memiliki beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pariwisata juga memiliki beberapa anak cabang yaitu akomodasi, atraksi (obyek dan daya tarik wisata), restoran dan catering, konvensi intensif dan pameran impresariat, perjalanan dan transportasi wisata, kajian kepariwisataan, informasi dan komunikasi pariwisata, pemasaran pariwisata, perencanaan dan pengelolaan destinasi. Bagi negara Indonesia kegiatan sektor ini telah menunjukkan peran yang cukup berarti, terutama sebagai penggerak kegiatan perekonomian melalui kontribusinya terhadap pendapatan devisa negara, pendapatan asli daerah, peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja (Muwardi, 1998).

Pariwisata merupakan kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungan yang biasanya dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus untuk mendapatkan kesenangan, melakukan bisnis ataupun tujuan lainnya. Taroepratjeka (1998) mengatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang mempertemukan manusia dengan suatu keadaan di luar lingkungannya serta dapat menimbulkan rasa kagum, merasakan kenyamanan bahkan dapat pula menimbulkan tantangan pada dirinya.

Keadaan yang dimaksud dapat berwujud sebagai keadaan alam, budaya maupun kondisi khusus, baik sebagai obyek maupun daya tariknya.

Dalam kegiatan bidang pariwisata akan menimbulkan kelompok-kelompok tertentu, yaitu 1) kelompok wisatawan, sebagai sisi yang senantiasa menekankan pada permasalahan bagaimana mendapatkan pelayanan, wisatawan akan membeli pelayanan yang baik dari tuan rumah. 2) kelompok tuan rumah, yang akan selalu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak wisatawan. 3) hubungan antara wisatawan dan tuan rumah (Mathieson dan Wall 1982).

Di dalam pertemuan antara tuan rumah dengan wisatawan terjadi hubungan yang tidak seimbang, hal ini nampak dari sikap wisatawan yang senantiasa bebas bergerak, menikmati pengalaman yang berbeda dengan wilayah atau negaranya. Di pihak lain, tuan rumah tidak bisa bergerak dengan leluasa. Oleh karena itu, hubungan atau pertemuan antara wisatawan dan tuan rumah secara timbal balik ini akan memunculkan perubahan atau dampak. Dampak pariwisata biasanya merujuk pada suatu perubahan, perubahan kualitas hidup tuan rumah, termasuk perilaku moral, hubungan personal, religi, bahasa, bahkan kesehatan pada penduduk di daerah tujuan wisata. Wujudnya bisa menunjuk ke arah kesenangan, gangguan, permusuhan, ketidak senangan, kelesuan (Mathieson dan Wall, 1982).

### **Perubahan Sosial**

Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara makro dapat mempengaruhi dan memberi kontribusi bagi kelancaran pembangunan di berbagai bidang. Pada sisi lain, interrelasi dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat maupun dampak adanya kegiatan pariwisata

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi eksistensi dan aktifitas sosial dalam masyarakat, yang menurut Wahab (1996), dapat menjadi unsur keberuntungan bagi negara penerima.

Keterlibatan pasif dan normatif masyarakat dalam kegiatan pariwisata, bila dikaji dengan baik akan membentuk suatu kualitas dan kekuatan pribadi masyarakat dan bangsa yang tanggung, kokoh dan kuat. Menurut Suryahadiprojo (1997) menegaskan bahwa kekuatan rakyat sebaiknya didukung oleh kehidupan yang cukup sejahtera dan maju dalam segi materi. Rakyat yang cukup sejahtera, ia juga menjadi lebih sehat dan mampu untuk mengembangkan aneka ragam kekuatan. Dalam konteks yang lebih spesifik, untuk mengantisipasi kemungkinan berbagai bahaya yang mengancam pembangunan pariwisata terhadap identitas kehidupan, terpilihnya nilai-nilai, benda-benda, fasilitas kebudayaan yang menjadi ciri khas kebudayaan daerah.

Perubahan sosial diartikan sebagai suatu perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap dan pola perilaku. Perubahan sosial merupakan suatu proses sosial dimana nilai-nilai, sikap atau lembaga-lembaga masyarakat seperti pendidikan, keluarga, agama dimodifikasi. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat (Jamila, 2007). Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.

Perubahan sosial bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba, terlebih apabila perubahan sosial tersebut melibatkan individu atau kelompok sosial sebagai target perubahan. Munculnya gagasan baru, temuan baru serta munculnya kebijakan baru

tidak dapat serta merta diterima begitu saja oleh individu atau kelompok. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa proses perubahan pola pikir yang dominan sulit untuk diubah.

Perubahan sosial dapat terjadi karena suatu hal yang bersifat alami, merupakan suatu perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang disebabkan oleh program tertentu yang sudah direncanakan, biasanya karena adanya intervensi yang bersumber dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri.

Perubahan sosial diartikan sebagai suatu perubahan yang berarti dan terjadi dalam hidup individu atau masyarakat pada saat dihadapkan pada keadaan sekelilingnya saat ini, dengan senantiasa membandingkan keadaan sebelumnya dan dengan masa kini yang diakibatkan adanya kemauan, keinginan untuk maju atau berkembang. Perubahan sosial yang dimaksudkan disini merupakan tuntutan dari luar dan dari dalam, sehingga perlu perencanaan yang maksimal.

Pada perubahan yang direncanakan biasanya diperlukan suatu strategi. Pengertian strategi pada mulanya hanya berlaku bagi kaum militer, yakni seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan politik (Liddle Hart, 1957). Salah satu strategi perubahan sosial yakni dengan pendidikan.

## **METODE**

Tulisan ini dianalisa dengan menggunakan metode sebagai berikut.

1. Metode Deskripsi, artinya peneliti menguraikan secara teratur mengenai permasalahan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis juga menguraikan perkembangan jumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA. Dengan menggunakan metode

diskripsi ini akan di dapat gambaran yang sebenarnya mengenai lembaga pendidikan tinggi pariwisata swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Metode Periodisasi, artinya peneliti berupaya mengemukakan tahapan/perubahan/perkembangan lembaga pendidikan tinggi pariwisata swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1970 sampai dengan 2006, dimulai dari Politeknik API, Akademi Pariwisata Indraprasta, Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, Akademi Pariwisata Yogyakarta, Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti, Akademi Pariwisata Stipary, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo, dan Akademi Pariwisata BSI.
3. Metode Deduktif, metode ini peneliti gunakan untuk membuat kesimpulan dari interpretasi mengenai perkembangan lembaga pendidikan tinggi pariwisata swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **PEMBAHASAN**

Wisatawan atau orang yang datang ke suatu tempat biasanya tidak mengenal budaya setempat, supaya dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik dengan penduduk maka diperlukan pengetahuan baru yakni bahasa. Dengan bahasa interaksi kedua belah pihak akan dapat berjalan dengan baik serta tidak terjadi kesalah pahaman. Dalam hal ini mulai terjadi perubahan yakni penduduk berusaha belajar bahasa agar dapat berkomunikasi dengan wisatawan. Dengan demikian semakin tinggi kedatangan wisatawan maka akan semakin tinggi pula interaksinya.

Apabila kondisi yang demikian terjadi secara terus menerus dalam waktu yang sangat lama, akan terjadikondisi saling mempengaruhi. Hal ini, akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku baru. Perubahan perilaku yang diakibatkan adanya

dorongan kesenangan sesaat. Dimensi lain yang perlu diantisipasi dalam pariwisata adalah interrelasi dan interaksi langsung antara wisatawan dan masyarakat yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola, perilaku, minat, motivasi dan tujuan para wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata. Masalah ini perlu diantisipasi sedini mungkin guna mencegah terjadinya perubahan sosial secara fundamental yang tidak sesuai dengan nilai luhur, moralitas dan mentalitas masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi ini perlu kebijakan pariwisata yang mencerminkan upaya merekayasa perubahan sosial sekaligus mencegah periode anomie dimana situasi sosial psikologi masyarakat diwarnai kebingungan (Selo Soemardjan, 1991).

Pariwisata dapat dikatakan bahwa tidak hanya berkaitan dengan permasalahan dalam negeri (nasional) saja melainkan juga menjadi bagian dari persoalan internasional. Demikian halnya pertumbuhan pariwisata Indonesia yang senantiasa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun ke tahunnya, memerlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Ini sangat bergantung pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia yang andal.

Menurut Sarbini (2010) kebutuhan sumber daya manusia pariwisata secara simultan mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan pariwisata. Hal ini berlanjut dengan keberadaan Keppres No 15 pada tanggal 9 Maret 1983 mengenai kebijakan pengembangan pariwisata, yang menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tenaga kerja yang berpengetahuan luas, terampil dan ahli. Dengan Keppres ini, semakin memberi peluang dan kemudahan pendirian pusat-pusat pelatihan kepariwisataan termasuk melakukan peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga pariwisata melalui pendirian lembaga pelatihan dan pendidikan pariwisata.

Demikian halnya dengan berkembangnya pariwisata di Yogyakarta, membawa akibat pada kebutuhan akan sumber daya manusia. Dalam artian bahwa sumber daya manusia di bidang ini bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan secara kuantitas saja, akan tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu dalam rangka memenuhi, mengisi, meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan sistem pendidikan pariwisata yang sesuai dengan standar internasional.
2. Tersedianya rencana dan rancangan proses peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pariwisata Indonesia.

Untuk menjawab persoalan sumber daya manusia di bidang pariwisata maka ketersediaan rencana dan rancangan proses pembukaan lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan menjadi sedemikian penting. Hal ini akan dapat memenuhi permintaan kebutuhan tenaga kerja yang profesional. Kondisi ini juga dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pariwisata internasional.

Bidang pendidikan pariwisata yang produknya berupa jasa dapat dikatakan memiliki tugas untuk menciptakan nilai tambah (*value added*). Hal ini dilakukan dengan jalan menambah atau merubah masukan (*input*) perusahaan menjadi (*output*) yang memiliki kelebihan kemanfaatan atau utilitas yang memadai. Dengan demikian, maka bagi perusahaan perekrut tenaga kerja yang kurang berkualitas akan membebani perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan perlu mengalokasi investasi tambahan untuk mengolah kembali tenaga kerja tersebut sehingga menjadi tenaga siap pakai

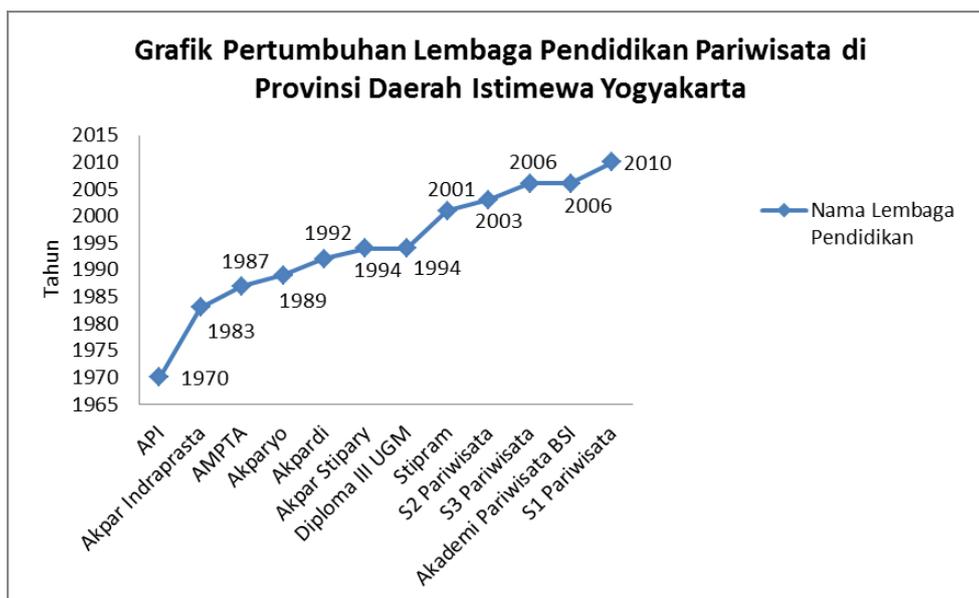
Dari sini nampak bagaimana pendidikan

pariwisata, memiliki peran strategis dan semakin dapat diandalkan, ketika kesempatan kerja di dalam negeri semakin terbatas. Peluang ini dapat diraih apabila sumber daya manusia memiliki kompetensi tinggi. Pendidikan merupakan suatu proses belajar yang berkelanjutan, baik secara formal maupun non formal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan pada tahun 2012, seiring dengan majunya pariwisata di Yogyakarta maka keadaan ini juga berpengaruh terhadap lembaga pendidikan. Terbukti dengan minat calon mahasiswa yang menginginkan mempelajari bidang pariwisata juga mengalami kenaikan. Lembaga pendidikan pariwisata mengalami kenaikan secara signifikan dan mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1980 an sampai dengan tahun 1990 an.

Apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum, kondisi demikian ini belum seimbang/sebanding. Banyak yang belum mengetahui dan memahami apa yang dipelajari di bidang pariwisata khususnya bidang hotel. *Image* sebagai “jongos”, “kesan negatif hotel”, sebagai pelayan, menjadikan banyak pihak khususnya pendidikan tinggi pariwisata di Propinsi

orang tua yang tidak memberi izin anggota keluarganya masuk bidang pariwisata khususnya hotel. Kondisi ini menjadi kendala dalam pemenuhan sumber daya manusia bidang kepariwisataan.

Dengan bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pariwisata yang profesional di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berdirinya Akademi Pariwisata Indonesia di Yogyakarta mulai disambut pihak lain dengan mengikuti jejaknya yakni mendirikan lembaga-lembaga pendidikan pariwisata baru yang lain. Pada tahun 1980 berdiri Akademi Pariwisata Buana Wisata, Kemudian pada tahun 1983 diikuti lahirnya Akademi Pariwisata Indraprasta. Pada tahun 1987 Akademi Pariwisata Ambarrukmo Palace berdiri, Pada tahun 1989 diikuti dengan kehadiran dari Akademi Pariwisata Yadatepe yang kemudian berubah menjadi Akademi Pariwisata Yogyakarta dan pada tahun 1996 Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti serta Akademi Bina Sarana Informatika yang membuka jurusan perhotelan pada tahun 2006. Kesemua dari lembaga pendidikan tersebut didirikan oleh swasta Adapun perkembangan lembaga



. Grafik perkembangan lembaga pendidikan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : data primer 2012 diolah.

Dalam grafik dapat dilihat bahwa perkembangan lembaga pendidikan yang terjadi pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1994 didominasi oleh lembaga pendidikan yang memiliki jenjang pendidikan diploma III dengan jurusan perhotelan. Ini menggambarkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia pada tahap ini khususnya bidang perhotelan lebih banyak. Namun pada tahun 2001, terjadi penambahan permintaan yakni pada kebutuhan bidang manajerial, sehingga salah satu lembaga pendidikan yakni STP AMPTA menambah program studi administrasi hotel dan manajemen perjalanan wisata dengan jenjang pendidikan diploma IV, yang pada akhirnya merubah nama akademi pariwisata menjadi sekolah tinggi pariwisata. Puncaknya dengan pengakuan pariwisata sebagai ilmu, maka Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA menyelenggarakan pendidikan kesarjana bagi ilmu pariwisata.

Perkembangan lembaga pendidikan yang terjadi pada kurun waktu tersebut, keseluruhannya menggambarkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia di bidang pariwisata tidak dapat ditunda. Perkembangan lembaga pendidikan tinggi ini juga menunjukkan besarnya perhatian masyarakat Yogyakarta (dalam hal ini pihak swasta) dalam mengupaya sumber daya manusia pariwisata yang terdidik, terampil dan terlatih.

Sangat beralasan apabila jumlah tenaga terampil yang dibutuhkan dalam berbagai bidang pariwisata mengalami peningkatan dan kenaikan mengikuti dinamika perkembangan pariwisata. Dalam hal ini lembaga pendidikan pariwisata memberi kesempatan untuk meningkatkan dari salah satu perguruan tinggi

keprofesionalan yang berhubungan dengan dunia pariwisata. Pendidikan pariwisata harus dapat menciptakan lingkungan dan kesempatan bagi pengembangan sikap ilmiah dalam usaha mempelajari hingga memahami ke arah profesional dalam arti sebenarnya yang dilihat dari berbagai gejala dan peristiwa.

Bidang pariwisata tidak dapat lepas dari kondisi dalam negeri. Ketika situasi politik dalam negeri tidak kondusif, saat negara Indonesia sedang marak dengan terjadinya pengeboman di Bali dan di beberapa daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka kondisi tersebut menimbulkan efek yakni penurunan yang sangat tajam terhadap kunjungan wisatawan ke Indonesia, bidang pariwisata mengalami masa keterpurukan

Kondisi ini juga berimbas ke Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang pariwisata mengalami kelesuan, terjadinya penurunan pada wisatawan yang berkunjung, baik itu wisatawan mancanegara maupun nusantara. Ini mengakibatkan banyak kamar kosong, jumlah kamar hotel lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang menginap, yang pada gilirannya menyebabkan banyak pengangguran . (Arwan Tuti Artha, tt) .

Hal ini, berdampak pada keinginan dan minat calon mahasiswa dalam memasuki lembaga pendidikan pariwisata khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pada tahun 2009 hampir sebagian besar lembaga pendidikan pariwisata yang ada di Yogyakarta mengalami penurunan dalam penerimaan mahasiswanya, lembaga pendidikan pariwisata tidak begitu diminati lagi oleh calon mahasiswa.

Sebagai ilustrasi digambarkan peminat

Tahun Akademi	Jumlah Pendaftar	Jumlah Registrasi
2002/2003	713	428

2003/2004	691	477
2004/2005	606	392
2005/2006	449	297
2006/2007	307	200
2007/2008	293	208
2008/2009	315	202
2009/2010	331	240
2010/2011	292	224
2011/2012	269	222
2012/2013	376	288

Sumber : buku data mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 2013.

## KESIMPULAN

Kegiatan pariwisata akan berhasil dengan baik apabila tidak hanya sekedar ditopang oleh daya tarik wisata yang mempesona, tetapi juga tersedianya sumber daya manusia yang mengelola daya tarik tersebut dengan baik. Pariwisata tidak akan berhasil hanya dengan keberadaan daya tarik wisatanya yang mempesona, tetapi harus didukung dengan sumberdaya manusia yang handal, berkualitas dan tanggap dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi.

Namunseiring dengan majunya pariwisata di Yogyakarta, kebutuhan sumber daya manusia pariwisata yang profesional, terdidik, terlatih dan terampil, tidak dapat dihindarkan. Kondisi berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pendidikan tinggi pariwisata yang dibuktikan dan minat calon mahasiswa yang menginginkan mempelajari bidang pariwisata mengalami kenaikan. Dari sini nampak lembaga pendidikan tinggi pariwisata memiliki peran strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

Abas, J, ' Strategi Pengelolaan Pendidikan

Tinggi Pariwisata di Era Globalisasi dan Pasar Bebas (AFTA), *Jurnal Pariwisata Wahana Ilmu, Pembuka Cakrawala*, ISSN 1411-1527, hal 11-22. Baparda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009. *Statistik Pariwisata Tahun 2009*.

*Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA*, 2012, Yogyakarta

*Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA*, 2014, Yogyakarta

Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Kepariwisataan 2008*

Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Kepariwisataan 2009*

Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Kepariwisataan 2010*

Jamila, Ellis MP, Indraprasetia, " Pendidikan dan Perubahan Sosial" *Jurnal Madani*. Volume 8, No 2, Juni 2007, hal 290-300 Liddle Hard, 1987, *Strategy*, Frederick A. Praeger Inc, New York. Mathieson dan Wall, 1982, *Tourism: Economic, Physical and Sosial Impacts*, Longman, Harlow.

Muwardi, Witjaksono, 1998, "Kualifikasi

- Sumber Daya Manusia di Sektor Publik”, *Prosiding, Lokakarya Pendidikan Kepariwisata Menyongsong Era Globalisasi, kerjasama Pusdiklat Depparsenibud, HILDIKTIPARI P2Par-ITB 3-4 Juli 1998, Bandung.*
- Pitana, I G, 2010, “ Globalisasi Pariwisata Dan Implikasinya Bagi Strategi Pengembangan SDM” *Makalah* pada kuliah kuliah umum di Magister Kajian Pariwisata pada tanggal 1 Oktober, Yogyakarta .
- Sarbini, 2010, *Paradigma Baru Ilmu Pariwisata, Rekreasi, Yogyakarta.*
- Soemardjan, Selo, dkk, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara, BP 7 Pusat, Jakarta.*
- Suryohadiprojo, Sayidiman, 1997, “Ketahanan Nasional Indonesia”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, diterbitkan atas kerjasama PPS-UGM dengan Lemhannas, Edisi II(1) April 1997, Yogyakarta.
- Sidarta, IT, 2002, “Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat, Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Sanur Denpasar, Bali”. *Tesis*, Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Taroepratjeka, H, 1998, “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata”, *Prosiding, Lokakarya Pendidikan Kepariwisata Menyongsong Era Globalisasi, Kerjasama Pusdiklat Depparsenibud, Hildiktipari, P2Par –ITB, 3-4 uli1998, Bandung.*
- Tuti AA, Tanpa Tahun, *Yogyakarta Tempo Doeloe, Sepanjang CatatanPariwisata, Bigraf Publisng, Yogyakarta.*
- Wahab, Salah, 1996, *Manajemen Kepariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Buku data mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 2013.